



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2, Jl. Patimura No. 28 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126, Fax. (021) 7257126

DOKUMEN

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL - RPL)



PEMBANGUNAN JALAN TOL PROBOLINGGO - BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR



PT. BLANTICKINDO ANEKA

PLANNING - ENGINEERING - DESIGNING - MANAGEMENT - ECONOMIC CONSULTANT

• Wijaya Grand Center Blok 5-17, Jl. Wijaya II Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. : (021) 7247-480
• Jl. Cincin IV No. 13 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. : (021) 7279-0215





KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Program Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, salah satunya adalah Rencana pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ANDAL terdahulu telah disusun pada tahun 2016 dan mengingat adanya perubahan trase jalan tol, maka perlu dilakukan perubahan dokumen lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya pada pasal 50 ayat (4) disebutkan bahwa : Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :

- a. Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru ; atau
- b. Penyampaian dan penilaian terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL.

Pergeseran trase rencana jalan tol belum tercakup di dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2006, sehingga Badan Pengatur Jalan Tol mengajukan permohonan perubahan Izin lingkungan melalui penyusunan dokumen Adendum ANDAL dan RKL -RPL

Kami selaku Pemrakarsa Badan Pengatur Jalan Tol mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan dan pengarahan. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Pengatur Jalan Tol

Ir. Arief Witjatksono.M.Eng.Sc.
NIP. 19581009 198603 1 003



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL-RPL	I-1
1.2 Kebijakan Lingkungan Hidup	I-2
BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL).....	II-1
BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)	III-1
BAB IV JUMLAH dan JENIS PPLH yang DIBUTUHKAN	IV-1
BAB V PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL	V-1
Daftar Pustaka	



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Matriks Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)	2-1
Tabel 3.1. Matriks Ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL).....	3-1



1. PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL-RPL

Maksud dilaksanakannya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah melakukan penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, adalah sebagai berikut :

1. Mencegah atau menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
2. Menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir; dan/atau
3. Mengoptimalkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Sementara maksud dan tujuan dilaksanakannya Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah untuk:

1. Menguji kemampuan pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup yang dilaksanakan.
2. Mengetahui rona lingkungan hidup pada saat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan maupun sesudahnya.
3. Menciptakan sistem peringatan dini terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup yang tidak terduga sebelumnya, mekanisme pengendali pengelolaan lingkungan dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait melalui pertukaran informasi mengenai lingkungan hidup.

Sistematika dalam penyusunan dokumen RKL-RPL ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Lampiran-3 mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL.

1.2. Kebijakan Lingkungan Hidup

Komponen lingkungan yang tetap dipertahankan dan dilestarikan, antara lain sumber daya perairan seperti ikan, plankton, benthos; daya dukung lingkungan; dan kesehatan serta kenyamanan lingkungan. Komponen lingkungan hidup yang ditoleransi untuk berubah antara lain meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta pembangunan infrastruktur seperti; jaringan jalan, transportasi dan komunikasi. Kebijakan Lingkungan Hidup yang akan dilakukan oleh BPJT selaku pemrakarsa kegiatan dalam mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang akan timbul sebagai berikut:

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai lingkungan hidup.
2. Mengupayakan agar kepentingan ekonomi/finansial dan ekologi tetap berimbang dengan fungsi sosial sehingga akan terwujud pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
3. Melakukan konservasi sumber daya alam antara lain dengan penghematan energi, air dan sumber daya alam lainnya.
4. Konsisten dalam melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dampak negatif yang timbul diminimalkan sedangkan dampak positif dioptimalkan.
5. Menerapkan konsep pembangunan kawasan dengan mempertahankan ekosistem, kawasan hijau dan perairan.
6. Mengajukan agar kontraktor yang ditunjuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawannya di bidang lingkungan hidup



2. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

BAB II

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

Tabel 2.1. Matrik Ringkasan RKL
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
TAHAP PRA KONSTRUKSI							
Komponen Sosekbud							
1	Timbulnya Spekulasi Tanah	Pembebasan lahan	Tidak adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang jual beli tanah terkait pembangunan jalan tol	Melaksanakan pembebasan lahan atau pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Desa dan Kelurahan di sepanjang rencana pembangunan jalan tol yang terkena pembebasan lahan untuk proyek jalan tol .	Selama pembebasan lahan tengah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Panitia Pengadaan Tanah b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							dan Kabupaten Banyuwangi
2	Berkurangnya Lahan Pertanian	Dampak langsung dari pembebasan lahan	Keberhasilan memberikan lahan pertanian pengganti akibat berubah menjadi jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan uang penggantian lahan yang terkena pembebasan dengan harga yang layak agar pemilik lahan dapat membeli lahan baru sebagai lahan pengganti. Karena lahan pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat petani b. Alternatif lainnya mencarikan lahan pertanian baru sebagai pengganti dari lahan lama yang terkena pembebasan lahan 	Desa dan Kelurahan di sepanjang rencana pembangunan jalan tol yang terkena pembebasan lahan untuk proyek jalan tol .	Selama pembebasan lahan tengah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Panitia Pengadaan Tanah b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
3	Timbulnya Keresahan Masyarakat	Dampak langsung dari pembebasan lahan	Keresahan sosial yang terjadi akibat pembebasan lahan dapat diatasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi status lahan yang akan dibebaskan berupa tanah dan bangunan, serta diumumkan secara tertulis di Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan. b. Melakukan: musyawarah dan pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan c. Membuat berita acara kesepakatan nilai ganti rugi dan ditindak lanjuti dengan berita acara penyerahan hak atas tanah. 	Desa dan Kelurahan di sepanjang rencana pembangunan jalan ini yang terkena pembebasan lahan/bangunan untuk proyek jalan tol .	Selama pembebasan lahan tengah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Panitia Pengadaan Tanah b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> d. Besar ganti rugi sesuai musyawarah dan mufakat serta memperhatikan faktor lain seperti harga pasar, faktor lingkungan dan lainnya e. Penyuluhan intensif /sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan jalan Tol. f. Segera dilakukan sertifikasi tanah dan pembuatan paok tanah agar tidak terjadi klaim dikemudian hari 			<ul style="list-style-type: none"> Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
4	Perubahan Persepsi Masyarakat	Persepsi positif akibat langsung dari sosialisasi kegiatan Persepsi negatif dampak turunan dari keresahan masyarakat atau akibat tidak langsung dari pembebasan lahan	Persepsi negatif dapat diatasi sehingga anggota masyarakat sekitar semuanya berpersepsi positif atau proyek mendapat dukungan penuh dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan secara rinci, jelas dan transparan (dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi) kepada masyarakat tentang mekanisme penyelesaian lahan yang akan dibebaskan b. Memasang papan pengumuman yang berisi penjelasan secara rinci tentang mekanisme penyelesaian lahan yang akan dibebaskan di kantor desa atau kecamatan. c. Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kecamatan pada setiap rencana kegiatan proyek agar diperoleh informasi yang akurat d. Melakukan sosialisasi dan penjelasan tentang pembangunan jalan tol melalui media masa setempat yaitu televisi, radio dan koran 	Desa dan Kelurahan di sepanjang rencana pembangunan jalan tol yang terkena pembebasan lahan untuk proyek jalan tol .	Selama pembebasan lahan tengah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana Panitia Pengadaan Tanah b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Camat dan Kepala Desa/Lurah yang dilakukan sosialisasi dan terkena pembebasan lahan
TAHAP KONSTRUKSI							
Komponen Geofisik-Kimia							
1	Penurunan Kualitas Udara	Dampak langsung dari pengoperasian basecamp	Kandungan Debu, O ₃ , CO, NO ₂ , SO ₂ dan HC tidak melewati ambang batas yg berlaku (PP 41 Tahun 1999): Debu: 230 ug/Nm ³ O ₃ : 235 ug/Nm ³ CO: 30.000 ug/Nm ³ NO ₂ : 400 ug/Nm ³ SO ₂ : 900 ug/Nm ³ HC: 160 ug/Nm ³	a. Menggunakan genset yang dilengkapi dengan filter gas buang b. Perawatan secara rutin mesin genset yang digunakan sebagai sumber energi listrik pada pengoperasian <i>basecamp</i>	Lokasi yang dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	Tahap konstruksi, selama dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
		Dampak langsung dari mobilisasi peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi		a. Menggunakan kendaraan yang laik jalan untuk pengangkutan peralatan berat dan material konstruksi b. Kecepatan kendaraan diatur kurang 30 km/jam pada ruas jalan yang dekat permukiman dan di ruas jalan tidak dikeraskan dengan aspal atau beton c. Penyiraman jalan yang tidak dikeraskan dengan aspal atau beton dengan air apabila lebih dari 1 minggu tidak turun hujan d. Perawatan secara rutin mesin kendaraan pengangkut peralatan berat dan material konstruksi	Jalan proyek yang digunakan untuk mobilisasi peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi	Tahap konstruksi, selama dilakukan mobilisasi peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi	
		Dampak langsung dari pembersihan lahan		a. Penyiraman lahan yang dilakukan pembersihan dengan air jika lebih dari 1 minggu tidak turun hujan b. Perawatan rutin mesin alat berat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembersihan lahan	Lokasi yang dilakukan pembersihan lahan	Tahap konstruksi, selama dilakukan pembersihan lahan	
		Dampak langsung penggalian dan penimbunan tanah		a. Penyiraman lahan yang dilakukan penggalian dan penimbunan dengan air jika lebih dari 1 minggu tidak turun hujan	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah pada pembangunan jalan tol.	Tahap konstruksi selama dilakukan penggalian dan penimbunan tanah	

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan		b. Perawatan rutin mesin-mesin alat berat dan genset yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah			
		Dampak langsung dari pembangunan jaringan drainase		Perawatan rutin mesin-mesin alat berat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Areal yang dilakukan pekerjaan perkerasan badan jalan dan pembuatan jembatan	Tahap konstruksi selama dilakukan pekerjaan badan jalan dan pembuatan jembatan	
		Dampak langsung dari pembangunan jaringan drainase		Perawatan rutin mesin-mesin alat berat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan drainase	Areal yang dilakukan pekerjaan perkerasan pembangunan jaringan drainase	Tahap konstruksi selama dilakukan pekerjaan pembangunan jaringan drainase	
2	Peningkatan Kebisingan	Dampak langsung dari pengoperasian <i>basecamp</i>	Tingkat kebisingan tidak melewati ambang batas yang berlaku (Kep-48/MenLH/XI/1996), permukiman – 55 dBA, dan areal bandara 70 dBA	a. Menggunakan genset yang dilengkapi dengan tutup peredam kebisingan b. Perawatan secara rutin mesin genset yang digunakan sebagai sumber energi listrik pada pengoperasian <i>basecamp</i>	Lokasi yang dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	Tahap konstruksi, selama dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan
		Dampak langsung dari mobilisasi peralatan berat dan material konstruksi		a. Menggunakan kendaraan yang laik jalan untuk pengangkutan peralatan berat b. Kecepatan kendaraan diatur kurang 30 km/jam pada ruas jalan yang dekat permukiman c. Perawatan secara rutin mesin kendaraan pengangkut peralatan berat a. Pemasangan peredam kebisingan pada knalpot	Jalan eksisting yang digunakan untuk mobilisasi peralatan berat dan material konstruksi	Tahap konstruksi, selama dilakukan mobilisasi peralatan berat dan material konstruksi	
		Dampak langsung dari pembersihan lahan		Perawatan mesin secara rutin mesin alat berat yang digunakan untuk pembersihan lahan	Lokasi dilakukan pembersihan lahan	Tahap konstruksi, selama dilakukan pembersihan lahan	

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah		Perawatan mesin secara rutin mesin alat berat yang digunakan penggalian dan penimbunan tanah	Lokasi dilakukan penggalian dan penimbunan tanah	Tahap konstruksi, selama dilakukan penggalian dan penimbunan tanah	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
		Dampak langsung dari perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan		Perawatan mesin secara rutin mesin alat berat yang digunakan untuk perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Lokasi dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Tahap konstruksi, selama dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	
		Dampak langsung dari pembangunan jaringan drainase		Perawatan mesin secara rutin mesin alat berat yang digunakan untuk pembangunan jaringan drainase	Lokasi dilakukan pembangunan jaringan drainase	Tahap konstruksi, selama dilakukan pembangunan jaringan drainase	
3	Peningkatan Getaran	Dampak langsung dari perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Tingkat getaran tidak melewati ambang batas yang bertaku (Kep-49/MenLH/XI/1996),	a. Pada pemasangan tiang pancang dengan menggunakan mesin borpile (tidak ditumbuk) b. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat dalam hal mengantisipasi sebaran getaran agar tidak merusak bangunan di sekitar	Lokasi dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Tahap konstruksi, selama dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Inststitusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
4	Perubahan Bentang Alam	Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	Bentang alam baru lebih landai yang terjadi sesuai dengan yang direncanakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan lahan datar sampai landai yang terbentuk untuk pmbangunan jalan tol. b. Lereng galian yang terbentuk dibuat landai sehingga tidak mudah longsor dan tererosi. c. Penanaman lereng galian dengan tanaman penahan longsor (bambu, beringin, kaliandra) d. Pemasangan dinding penahan longsor. 	Areal yang dilakukan penggalian dan penimbunan untuk pembangunan jalan tol.	Tahap konstruksi, selama dilakukan penggalian dan penimbunan tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
5	Gangguan Stabilitas Lereng	Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	Lereng yang terbentuk stabil tidak mudah longsor	<ul style="list-style-type: none"> a. Lereng galian yang terbentuk dibuat landai dan di setiap perbedaan elevasi dibuat terasering sehingga tidak mudah longsor dan tererosi. b. Penanaman lereng galian dengan tanaman penahan longsor dan erosi (bambu, beringin, kaliandra, rerumputan dan kacang-kacaangan) c. Pemasangan dinding penahan longsor pada lokasi yang batuannya rapuh 	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah untuk pembangunan jalan tol.	Tahap konstruksi, selama dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
6	Perubahan Pola Aliran Air Hujan	Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	Pola aliran air hujan terkendali sehingga banjir dan genangan air yang terjadi dapat terkendali serta tidak terjadi banjir dan genangan air di lokasi proyek ataupun areal sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan dilakukan pada bulan-bulan dengan jumlah hari hujan kecil b. Pembuatan saluran drainase sementara yang digunakan selama masa konstruksi khususnya pada pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah c. Memanfaatkan saluran drainase alam untuk menyalurkan air larian 	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan untuk pembangunan jalan tol.	Tahap konstruksi, selama dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasa yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
7	Peningkatan Erosi Dan Sedimentasi	Dampak langsung dari penggalian	Erosi dan sedimentasi yang terjadi dapat terkendali	a. Pekerjaan dilakukan pada bulan-bulan dengan jumlah hari hujan kecil	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan untuk	Tahap konstruksi, selama dilakukan	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dan penimbunan tanah		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembuatan saluran drainase sementara untuk menyalurkan air larian c. Penanaman lereng galian dengan tanaman penahan longsor dan erosi (bambu, beringin, kaliandra, rerumputan dan kacang-kacangan) 	pembangunan jalan tol.	penggalian dan penimbunan tanah	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
8	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Dampak langsung dari pengoperasian <i>basecamp</i>	Parameter BOD, COD, TSS, detergen, minyak dan lemak, kolfom tidak melewati ambang batas yang berlaku (PP 82 Tahun 2003)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinja dan urin dari tenaga kerja dimasukkan ke toilet, diteruskan ke septic tank yang memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan b. Limbah cair domestik yang tidak masuk toilet diolah dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke sungai mengingat air sungai sudah tercemar berat (Lihat Lampiran-4) 	Lokasi dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	Tahap konstruksi, selama dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari pembersihan lahan	Parameter TSS tidak melewati ambang batas yang berlaku (PP 82 Tahun 2003: 50 mg/l)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan dilakukan di bulan-bulan dengan jumlah hari hujan kecil b. Pemasangan perangkat sedimen di saluran drainase sementara yang menuju ke badan air atau drainase alam 	Areal yang dilakukan pembersihan lahan	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan	<ul style="list-style-type: none"> b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	Parameter TSS tidak melewati ambang batas berlaku (PP 82 Tahun 2003: 50 mg/l)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan dilaksanakan di bulan-bulan dengan jumlah hari hujan kecil b. Pembuatan jaringan drainase sementara yang menuju badan air atau drainase alam dan dilengkapi dengan bak pengendapan sedimen c. Penggalian dan penimbunan tidak dilakukan pada bagian yang tegegenang air 	Areal yang dilakukan penggalian dan penimbunan tanah	Tahap konstruksi selama dilakukan penggalian dan penimbunan tanah	
		Dampak langsung dari perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Parameter TSS tidak melewati ambang batas berlaku (PP 82 Tahun 2003: 50 mg/l)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menimbun material untuk perkerasan badan jalan di lokasi yang mudah dibawa air larian b. Menjaga jangan sampai terjadi ceceran material pada pembangunan jembatan jatuh ke sungai atau badan air c. Memasang jaring penahan ceceran jika ada material yang jatuh ke sungai atau badan air 	Areal yang dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Tahap konstruksi selama dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	
		Dampak langsung dari pembangunan jaringan drainase	Parameter TSS tidak melewati ambang batas berlaku (PP 82 Tahun 2003: 50 mg/l)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan penggalian untuk jaringan drainase dilakukan di bulan-bulan dengan jumlah hari hujan kecil b. Membersihkan tanah hasil galian yang berceceran tidak pada tempatnya c. Tanah urug yang dihamparkan segera dilakukan pemadatan d. Tidak menimbun material untuk pembangunan jaringan drainase di lokasi yang mudah terbawa oleh air larian 	Areal yang dilakukan pembangunan jaringan drainase	Tahap konstruksi selama dilakukan pembangunan jaringan drainase	
9	Perubahan Sistem Drainase	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Sistem drainase tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> a. Membersihkan saluran drainase yang tertutup oleh biomasa b. Membuat saluran drainase baru jika ada saluran drainase yang rusak karena tertutup biomasa atau tidak berfungsi karena terkena pembersihan lahan c. Memanfaatkan saluran drainase alam untuk menyalurkan air larian 	Sistem drainase yang terkena pembersihan lahan	Selama pembersihan lahan tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari penggalan dan penimbunan tanah		<p>a. Membersihkan saluran drainase yang tertutup tanah galian</p> <p>b. Membuat saluran drainase baru jika ada saluran drainase yang rusak akibat tergalai atau tertutup tanah galian</p> <p>c. Memanfaatkan saluran drainase alam untuk menyalurkan air larian</p>	Sistem drainase yang terkena penggalan dan penimbunan tanah	Selama penggalan dan penimbunan tanah tahap konstruksi beritaangsung	<p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p>
10	Perubahan Pola Aliran Irigasi	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Jaringan irigasi eksisting tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	<p>a. Membersihkan saluran irigasi yang tertutup oleh biomasa</p> <p>b. Membuat saluran irigasi baru jika ada saluran irigasi yang rusak karena tertutup biomasa atau tidak berfungsi karena terkena pembersihan lahan</p> <p>c. Pembuatan jaringan irigasi sementara yang difungsikan selama kegiatan konstruksi</p>	Sistem drainase yang terkena pembersihan lahan	Selama pembersihan lahan tahap konstruksi berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah		<p>a. Segera dilakukan pembangunan block culvert pada lintasan dengan jaringan irigasi eksisting</p> <p>b. Pembuatan jaringan irigasi sementara yang difungsikan selama kegiatan konstruksi</p> <p>d. Membersihkan saluran irigasi yang tertutup tanah galian</p> <p>e. Membuat saluran drainase baru jika ada saluran irigasi yang rusak akibat tergali atau tertutup tanah galian</p>	Sistem drainase yang terkena penggalian dan penimbunan tanah	Selama penggalian dan penimbunan tanah tahap konstruksi berlangsung	<p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p>
11	Gangguan Gorong-Gorong Eksisting	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Gorong-gorong eksisting tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	<p>a. Membersihkan gorong-gorong yang tertutup oleh biomasa</p> <p>b. Membuat gorong-gorong baru jika ada gorong-gorong yang rusak karena tertutup biomasa atau tidak berfungsi karena terkena pembersihan lahan</p> <p>a. Membersihkan gorong-gorong yang tertutup tanah galian</p> <p>b. Membuat gorong-gorong baru jika ada gorong-gorong yang rusak karena terkena penggalian dan penimbunan tanah</p>	Jaringan drainase dan gorong-gorong yang terpotong oleh pekerjaan pembersihan lahan	Selama pembersihan lahan tahap konstruksi berlangsung	<p>a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	Gangguan Utilitas Eksisting	Dampak langsung dari pembersihan lahan Dampak langsung dari penggalan dan penimbunan tanah	Jaringan utilitas tidak terkena kegiatan sehingga tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	<p>c. Melakukan pembangunan block culvert pada lintasan jalan tol dengan drainase atau saluraan irigasi eksisting</p> <p>a. Melakukan pemetaan terhadap adanya jaringan utilitas b. Koordinasi dengan institusi pemilik utilitas tentang tempat ditanamnya utilitas c. Pembersihan lahan dilakukan dengan hati-hati berpedoman pada peta utilitas d. Memperbaiki atau mengganti utilitas yang rusak karena pembersihan lahan</p> <p>a. Melakukan pemetaan terhadap adanya jaringan utilitas b. Koordinasi dengan institusi pemilik utilitas tentang tempat ditanamnya utilitas c. Penggalan dan penimbunan tanah dilakukan dengan hati-hati berpedoman pada peta utilitas e. Memperbaiki atau mengganti utilitas yang rusak karena penggalan dan penimbunan tanah</p>	Tempat terdapatnya utilitas sesuai hasil pemetaan dan petunjuk pemiliknya yang akan terkena pembersihan lahan Tempat terdapatnya utilitas sesuai hasil pemetaan dan petunjuk pemiliknya yang akan terkena penggalan dan penimbunan tanah	Selama pembersihan lahan tahap konstruksi berlangsung Selama penggalan dan penimbunan tanah tahap konstruksi berlangsung	<p>Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta pemilik Utilitas yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Derah Air Minum (PDAM), PT Telkom dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN)
Komponen Biologi							
1	Perubahan Populasi Flora Dan Fauna Darat	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Jenis dan jumlah vegetasi yang hilang	Pembersihan lahan seperluanya sesuai kebutuhan	Areal yang dilakukan pembersihan lahan	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum
		Dampak langsung dari penghijauan sisi kiri kanan jalan	Jenis dan jumlah vegetasi yang berhasil ditanam pada sisi kiri kanan jalan	Segera dilakukan penanaman pada sisi kiri kanan jalan seperti bambu, beringin, kalandra, bintaro, johar dan lainnya	Areal yang dilakukan penanaman pada sisi kiri kanan jalan	Tahap konstruksi selama dilakukan penghijauan sisi kiri kanan jalan	

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Gangguan Kehidupan Biota Perairan	Dampak tak langsung dari pengoperasian basecamp Dampak tidak langsung dari pembersihan lahan Dampak tidak langsung dari penggalan dan penimbunan Dampak tidak langsung dari perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Keaneka ragaman biota perairan (plankton, benthos dan nekton) di badan air tetap terjaga	Dengan mengelola dampak primernya yaitu penurunan kualitas air permukaan	Lokasi basecamp dioperasikan Areal yang dilakukan pembersihan lahan Areal yang dilakukan penggalan dan penimbunan Areal yang dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	Tahap konstruksi selama dilakukan pengoperasian basecamp Tahap konstruksi pembersihan lahan Tahap konstruksi selama dilakukan penggalan dan penimbunan Tahap konstruksi selama dilakukan perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak tidak langsung dari pembangunan jaringan irigasi			Areal yang dilakukan pembangunan jaringan irigasi	Tahap konstruksi selama dilakukan pembangunan jaringan irigasi	c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
Komponen Sosekbud							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Dampak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat partisipasi tenaga kerja lokal dalam kegiatan proyek. b. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dari upah/pendapatan yang dihasilkan dari proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan serta potensi tenaga lokal yang dapat direkrut. b. Mengatur rekrutmen pekerja dengan maksud agar tenaga lokal dari setiap desa/kelurahan dapat diikutsertakan dengan jumlah proporsional. c. Melakukan pengumuman bursa tenaga kerja proyek jalan tol di Kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat d. Memberikan upah/gaji sesuai dengan Upah Minimum Setempat e. Mengikutsertakan para tenaga kerja dalam program jamsostek 	Desa dan Kelurahan di sepanjang dan di sekitar rencana pembangunan jalan tol.	Tahap konstruksi selama dilakukan penerimaan tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat
2	Peningkatan Peluang Berusaha	Dampak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi	Terciptanya peluang usaha dari mitra sub-kontrak dalam kegiatan proyek. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dari pendapatan yang dihasilkan dari proyek. Adanya keterlibatan pihak swasta lokal dalam kegiatan pengangkutan maupun sebagai suplaier bahan-bahan material	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kontraktor lokal yang dapat dijadikan mitra/sub-kontrak dalam kegiatan pembangunan. b. Memberikan prioritas kepada pengusaha swasta lokal dalam pekerjaan pengadaan bahan/ material agar mendapatkan pekerjaan dari kegiatan proyek secara proporsional.. c. Melakukan pengumuman bursa peluang usaha pengadaan material di lokasi proyek atau kantor Desa, Kelurahan dan Kecamatan setempat 	Desa dan Kelurahan sekitar trase jalan tol	Selama tahap konstruksi, terutama pada pekerjaan pengadaan dan pengangkutan material darat dan sungai untuk proyek jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat
3	Timbulnya Kecemburuan Sosial	Dampak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi	Tidak adanya angkatan kerja setempat yang cemburu dan protes kepada proyek	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan prioritas menjadi pekerja (kasar) proyek kepada tenaga kerja lokal terutama yang lahannya terkena pembebasan lahan b. Melakukan pengumuman bursa tenaga kerja (madya, pekerja kasar) di proyek jalan di Kantor Kelurahan, Kantor Tenaga Kerja, 	Desa dan Kelurahan sekitar trase jalan tol	Tahap konstruksi selama penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat
4	Timbulnya Gangguan Kamtibmas	Dampak langsung dari pengoperasian basecamp	Kondisi kamtibmas tetap terjaga, sehingga tidak terjadi tindak kejahatan seperti pencurian, perkelahian, mabuk mabukan dan sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemba-ngunan jalan tol b. Melibatkan keamanan setempat (Kampling) untuk menjaga basecamp 	Lokasi basecamp dan sekitarnya	Tahap konstruksi selama dilakukan pengoperasian basecamp	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan hidup dan dan Kepolisian setempat di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan hidup dan dan Kepolisian setempat di Kabupaten

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
5	Berubahnya Lahan Pertanian	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Lahan pertanian masyarakat berupa sawah dan ladang akan berubah menjadi jalan tol	a. Pembersihan lahan seperlunya terbatas pada lahan yang akan dibangun jalan tol b. Jika terdapat lahan pertanian di luar lokasi rencana pembangunan jalan tol yang turut rusak karena pembersihan lahan akan dilakukan ganti rugi	Lahan pertanian yang dilakukan pembersihan dan sekitarnya	Tahap konstruksi selama pembersihan lahan berlangsung	a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah		a. Penggalian dan penimbunan tanah seperlunya terbatas pada lahan yang akan dibangun jalan tol b. Jika terdapat lahan pertanian di luar lokasi rencana pembangunan jalan tol yang turut rusak karena penggalian dan penimbunan tanah akan dilakukan ganti rugi	Lahan pertanian yang dilakukan penggalian dan penimbunan tanah dan sekitarnya	Tahap konstruksi selama penggalian dan penimbunan tanah berlangsung	c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Pemisahan Wilayah Permukiman	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Jalan penghubung antar wilayah permukiman tetap berfungsi walaupun ada pelaksanaan pembersihan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk sementara memperbaiki jalan penghubung antar wilayah permukiman yang rusak karena terkena pembersihan lahan b. Membangun baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen antar wilayah permukiman yang terpisah karena pembangunan jalan tol c. Pembangunan underpass/overpass sesuai rencana dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat 	Wilayah permukiman yang terkena pembersihan lahan	Tahap konstruksi selama pembersihan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Jawa Timur
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	Jalan penghubung antar wilayah permukiman tetap berfungsi walaupun ada pelaksanaan penggalian dan penimbunan tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk sementara memperbaiki jalan penghubung antar wilayah permukiman yang rusak karena terkena penggalian dan penimbunan tanah b. Membangun baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen antar wilayah permukiman yang terpisah karena pembangunan jalan tol. c. Pembangunan underpass/overpass sesuai rencana dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat d. Hasil pembangunan baru jalan dan jembatan penyeberangan akan dipergunakan juga pada tahap operasi 	Wilayah permukiman yang terkena penggalian dan penimbunan tanah	Tahap konstruksi selama penggalian dan penimbunan tanah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Terputusnya Hubungan Kekerabatan Masyarakat	Dampak langsung dari pembersihan lahan	Terganggunya mobilitas penduduk dalam bersilahturami dapat teratasi walaupun ada pelaksanaan pembersihan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk sementara memperbaiki jalan penghubung antar wilayah permukiman yang rusak karena terkena pembersihan lahan sehingga masyarakat dapat melakukan hubungan kekerabatan b. Membangun baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen antar wilayah permukiman yang terpisah karena pembangunan jalan tol sehingga masyarakat dapat melakukan hubungan kekerabatan c. Pembangunan underpass/overpass sesuai rencana dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat 	Wilayah permukiman yang terkena pembersihan lahan	Tahap konstruksi selama pembersihan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan	Terganggunya mobilitas penduduk dalam bersilahturami dapat teratasi walaupun ada pelaksanaan penggalian dan penimbunan tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk sementara memperbaiki jalan penghubung antar wilayah permukiman yang rusak karena terkena penggalian dan penimbunan tanah sehingga masyarakat dapat melakukan hubungan kekerabatan b. Membangun baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen antar wilayah permukiman yang terpisah karena pembangunan jalan tol sehingga masyarakat dapat melakukan hubungan kekerabatan c. Pembangunan underpass/overpass sesuai rencana dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat d. Hasil pembangunan baru jalan dan jembatan penyeberangan akan dipergunakan juga pada tahap operasi 	Wilayah permukiman yang terkena penggalian dan penimbunan tanah	Tahap konstruksi selama penggalian dan penimbunan tanah berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
8	Kerusakan Jalan Eksisting	Dampak langsung dari mobilisasi peralatan berat	Kerusakan jalan kabupaten dan jalan desa akibat mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobilisasi peralatan berat dari jalan arteri (jalan nasional) ke tapak proyek tidak menggunakan jalan kabupaten atau jalan desa yang lebarnya 	Jalan baru yang dibangun sebagai	Tahap konstruksi, selama dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			peralatan berat dapat dihindari	<p>hanya sekitar 4 sampai 5 m dan kapasitas untuk tekanan gandar kurang dari 3 ton</p> <p>b. Pembangunan jalan baru sebagai jalan masuk ke tapak proyek pada trase jalan masuk ke simpang susun</p> <p>c. Lebar perkerasan jalan baru 15 m dan dibangun untuk dapat dilewati oleh kendaraan berkapasitas 50 ton atau lebih oleh armada mobilisasi peralatan berat</p> <p>d. Jalan baru tersebut akan ditingkatkan menjadi jalan masuk ke simpang susun</p> <p>e. Jumlah jalan masuk yang dibangun sebanyak 7 ruas yaitu : Simpang Susun Kraksaan, Simpang Susun Paiton, Simpang Susun Besuki, Simpang Susun Situbondo, Simpang Susun Asembagus, Simpang Susun Bajulmati dan Simpang Susun Ketapang/Banyuwangi</p>	jalan masuk ke lokasi proyek	mobilisasi peralatan berat	<p>Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p>
	Dampak langsung dari pengangkutan material konstruksi		Kerusakan jalan kabupaten dan jalan desa akibat pengangkutan material konstruksi berat dapat dihindari	<p>a. Pengangkutan material konstruksi dari jalan arteri (jalan nasional) ke tapak proyek tidak menggunakan jalan kabupaten atau jalan desa yang lebarnya hanya sekitar 4 sampai 5 m dan kapasitas untuk tekanan gandar kurang dari 3 ton</p> <p>b. Pembangunan jalan baru sebagai jalan masuk ke tapak proyek pada trase jalan masuk ke simpang susun</p> <p>c. Lebar perkerasan jalan baru 15 m dan dibangun untuk dapat dilewati oleh kendaraan berkapasitas 50 ton atau lebih oleh armada pengangkutan material konstruksi</p> <p>d. Jalan baru tersebut akan ditingkatkan menjadi jalan masuk ke simpang susun</p> <p>e. Jumlah jalan masuk yang dibangun sebanyak 7 ruas yaitu : Simpang Susun Kraksaan, Simpang Susun Paiton, Simpang Susun Besuki, Simpang Susun Situbondo, Simpang Susun Asembagus, Simpang Susun Bajulmati dan Simpang Susun Ketapang/Banyuwangi</p>	Jalan baru yang dibangun sebagai jalan masuk ke lokasi proyek	Tahap konstruksi, selama dilakukan pengangkutan material berlangsung	

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
9	Penurunan Kinerja Jalan Eksisting	Dampak langsung dari mobilisasi peralatan berat	Kelancaran lalu lintas di jalan eksisting (kinerja jalan eksisting) tetap terjaga walaupun ada mobilisasi peralatan berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobilisasi peralatan berat dari jalan arteri (jalan nasional) ke tapak proyek tidak menggunakan jalan kabupaten atau jalan desa yang lebarnya hanya sekitar 4 sampai 5 m dan kapasitas untuk tekanan gandar kurang dari 3 ton, yang jika dilewati kendaraan besar maka V/C rasio akan = 1 (DS=1) b. Mobilisasi peralatan dari jalan arteri ke tapak proyek melalui jalan baru sebagai jalan masuk ke tapak proyek pada trase jalan masuk ke simpang susun c. Lebar perkerasan 15 m dan dapat dilewati oleh kendaraan berkapasitas 50 ton atau lebih oleh armada mobilisasi peralatan berat d. Jalan baru tersebut akan ditingkatkan menjadi jalan masuk ke simpang susun e. Jumlah jalan masuk yang dibangun sebanyak 7 ruas yaitu : Simpang Susun Kraksaan, Simpang Susun Paiton, Simpang Susun Besuki, Simpang Susun Situbondo, Simpang Susun Asembagus, Simpang Susun Bajulmati dan Simpang Susun Ketapang/Banyuwangi f. Penempatan petugas pengatur lalu lintas di persimpangan dari jalan arteri ke jalan masuk g. Memasang rambu lalu lintas di sekitar persimpangan dari jalan arteri ke jalan masuk 	Jalan baru yang dibangun sebagai jalan masuk ke lokasi proyek	Tahap konstruksi, selama dilakukan mobilisasi peralatan berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas
		Dampak langsung dari pengangkutan material konstruksi	Kelancaran lalu lintas di jalan eksisting (kinerja jalan eksisting) tetap terjaga walaupun ada pengangkutan material konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkutan material konstruksi dari jalan arteri (jalan nasional) ke tapak proyek tidak menggunakan jalan kabupaten atau jalan desa yang lebarnya hanya sekitar 4 sampai 5 m dan kapasitas untuk tekanan gandar kurang dari 3 ton, yang jika dilewati kendaraan besar maka V/C rasio akan = 1 (DS=1) b. Pengangkutan material konstruksi dari jalan arteri ke tapak proyek melalui jalan baru sebagai jalan masuk ke tapak proyek pada trase jalan masuk ke simpang susun 	Jalan baru yang dibangun sebagai jalan masuk ke lokasi proyek	Tahap konstruksi, selama dilakukan pengangkutan material berlangsung	

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> c. Lebar perkerasan 15 m dan dapat dilewati oleh kendaraan berkapasitas 50 ton atau lebih oleh armada pengangkutan material konstruksi d. Jalan baru tersebut akan ditingkatkan menjadi jalan masuk ke simpang susun e. Jumlah jalan masuk yang dibangun sebanyak 7 ruas yaitu : Simpang Susun Kraksaan, Simpang Susun Paiton, Simpang Susun Besuki, Simpang Susun Situbondo, Simpang Susun Asembagus, Simpang Susun Bajulmati dan Simpang Susun Ketapang/Banyuwangi f. Penempatan petugas pengatur lalu lintas di persimpangan dari jalan arteri ke jalan masuk g. Memasang rambu lalu lintas di sekitar persimpangan dari jalan arteri ke jalan masuk 			
10	Perubahan Budaya Kearifan Lokal	Dampak langsung dari pembersihan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya perubahan kebudayaan kearifan lokal dapat terkendalai walaupun ada pelaksanaan pembersihan lahan b. Tidak ada keluhan dari anggota masyarakat tentang adanya perubahan kearifan lokal yang selama ini dipertahankan masyarakat walaupun ada pelaksanaan pembersihan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk sementara memperbaiki jalan penghubung antar wilayah permukiman yang rusak karena terkena pembersihan lahan b. Membangun baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen antar wilayah permukiman yang terpisah karena pembangunan jalan tol c. Pembangunan underpass/overpass sesuai rencana dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat 	Wilayah permukiman yang terkena pembersihan lahan	Tahap konstruksi selama pembersihan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	a. Adanya perubahan kebudayaan kearifan lokal dapat terkendali walaupun ada pelaksanaan penggalian dan penimbunan tanah b. Tidak ada keluhan dari anggota masyarakat tentang adanya perubahan kearifan lokal yang selama ini dipertahankan masyarakat walaupun ada pelaksanaan penggalian dan penimbunan tanah	a. Untuk sementara memperbaiki jalan penghubung antar wilayah permukiman yang rusak karena terkena penggalian dan penimbunan tanah b. Membangun baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen antar wilayah permukiman yang terpisah karena pembangunan jalan tol. c. Pembangunan underpass/overpass sesuai rencana dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat d. Hasil pembangunan baru jalan dan jembatan penyeberangan permanen akan dipergunakan juga pada tahap operasi	Wilayah permukiman yang terkena penggalian dan penimbunan tanah	Tahap konstruksi selama penggalian dan penimbunan tanah berlangsung	Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas
11	Perubahan Persepsi Masyarakat	Dampak tak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi atau dampak turunan dari peningkatan pendapatan masyarakat	Persepsi negatif dapat diatasi sehingga anggota masyarakat sekitar semuanya berpersepsi positif atau proyek mendapat dukungan penuh dari masyarakat	Mengelola dampak primernya yaitu timbulnya kecemburuan sosial, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat	Desa/kelurahan yang dilewati jalan tol dan sekitarnya	Tahap konstruksi selama berlangsungnya penerimaan tenaga kerja konstruksi	a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo,

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
Komponen Kesehatan Masyarakat							
1	Gangguan Kesehatan Masyarakat	<p>a. Dampak tidak langsung dari mobilisasi peralatan berat dan peralatan konstruksi</p> <p>b. Dampak tidak langsung dari pengangkutan material konstruksi</p> <p>c. Dampak tidak langsung dari pekerjaan penggalian dan penimbunan</p> <p>d. Dampak tidak langsung dari</p>	Tidak terjadi peningkatan angka kesakitan karena timbulnya jenis penyakit (ISPA, iritasi mata) terkait dengan pekerjaan konstruksi jalan tol sehingga tidak terjadi keluhan masyarakat	Dengan mengelola dampak primernya yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<p>a. Jalan eksisting sekitar</p> <p>b. Jalan eksisting sekitar</p> <p>c. Areal dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan</p> <p>d. Areal dilakukan pekerjaan konstruksi jalan tol.</p>	<p>a. Tahap konstruksi, selama dilakukan mobilisasi/ demobilisasi peralatan berat dan peralatan kerja</p> <p>b. Tahap konstruksi, selama dilakukan pengangkutan material konstruksi</p> <p>c. Tahap konstruksi selama dilakukan</p>	<p>a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		pekerjaan perkerasan badan jalan				d. Tahap konstruksi selama dilakukan pekerjaan konstruksi jalan tol.	Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
2	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Pengoperasian <i>basecamp</i>	Terkelolanya limbah yang timbul karena penanganan dengan benar	<p>a. Limbah B3 berupa kain lap bekas, baterai bekas dan filter bekas dikemas dan disimpan sementara pada gudang penyimpanan limbah B3, setiap 3 bulan sekali diserahkan kepada perusahaan resmi pengumpul limbah B3</p> <p>b. Sampah domestik non B3 (potongan plastik, kardus, kertas bekas, sisa makanan dan bahan makanan, dikumpulkan pada tempat penimbunan sementara (TPS), setiap 2 hari sekali diangkut ke tempat pembuangan sampah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.</p>	Lokasi <i>basecamp</i>	Tahap konstruksi, selama dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i>	<p>a. Instansi Pelaksana kegiatan konstruksi yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
TAHAP OPERASI							
Komponen Geofisik Kimia							
1	Penurunan Kualitas Udara	Dampak langsung pengoperasian jalan tol. Dampak langsung dari pemeliharaan jalan	Kandungan Debu, Pb, O ₃ , CO, NO ₂ , SO ₂ tidak melewati ambang batas yg berlaku (PP 41 Thn 1999)	a. Mengoptimalkan ruang terbuka hijau pada area sekitar dengan vegetasi yang dapat menyerap polutan seperti angkana, mahoni, bambu Jepang, bunga kupu-kupu, johar b. Memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk taman c. Menghimbau para pemakai jalan tol untuk merawat secara rutin kendaraannya dengan baik dan melakukan uji emisi gas buang kendaraannya paling sedikit 1 tahun sekali.	Ruang terbuka hijau pada area sekitar jalan tol.	Tahap operasi selama pengoperasian jalan tol. tengah berlangsung	a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
2	Peningkatan Kebisingan	Dampak langsung pengoperasian jalan tol.	Tingkat kebisingan tidak melewati ambang batas yang berlaku (Kep-48/	a. Mengoptimalkan ruang terbuka hijau pada area sekitar dengan vegetasi yang dapat menahan pemaparan kebisingan seperti angkana, mahoni,	Ruang terbuka hijau pada area sekitar jalan tol.	Tahap operasi selama pengoperasian	a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Dampak langsung dari pemeliharaan jalan	MenLH(XI/1996), permukiman - 55 dBA, dan areal jalan 70 dBA	<p>bambu jepang, bunga kupu-kupu, johar dengan jarak tanam 3m x 3 m</p> <p>b. Memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk taman</p> <p>c. Menghimbau para pemakai jalan tol untuk merawat secara rutin kendaraannya dengan baik</p>		jalan tol, tengah bertangung	<p>Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p>
Komponen Sesekbud							
1	Penurunan Kinerja Jalan Di Sekitar Gerbang Masuk	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol karena antrian panjang kendaraan yang mau masuk jalan tol	Kelancaran lalu di persimpangan jalan masuk lintas tetap terjaga	<p>a. Menerapkan pembayaran tarif masuk jalan tol dengan eTol</p> <p>b. Menyediakan Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam jumlah cukup</p> <p>c. Melarang kendaraan berhenti atau parkir di depan gardu tol atau di persimpangan jalan keluar ke jalan arteri</p>	Jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol	Tahap operasi selama pengoperasian jalan tol, tengah bertangung	<p>a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Perubahan Penggunaan Lahan Di Sekitar Jalan Masuk Dan Keluar	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	Pertumbuhan bangunan di sekitar jalan masuk ke jalan tol dan jalan keluar dari jalan tol terkendali sehingga tidak menimbulkan dampak penurunan kinerja jalan	d. Koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dalam hal keterlibatan lalu lintas	Jalan arteri di sekitar jalan masuk dan jalan keluar dari jalan tol	Tahap operasi selama pengoperasian jalan tol, tengah berlangsung	Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas
				a. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum tentang keterlibatan terhadap bangunan yang tumbuh di sekitar jalan masuk ke jalan tol an jalan keluar dari jalan tol b. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam hal pemasangan rambu-rambu lalu lintas di luar jalan tol c. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat dalam hal inventarisasi penggunaan lahan terhadap bangunan yang tumbuh			a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Kinerja Jalan Arteri Eksisting	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di sepanjang jalan arteri antara Probolinggo sampai Banyuwangi karena berkurangnya jumlah kendaraan yang lewat jalan arteri	<p>a. Kelancaran dalam transaksi kendaraan yang masuk ke jalan tol dan yang keluar dari jalan tol dengan menerapkan pembayaran menggunakan eTol</p> <p>b. Menyediakan gardu tol otomatis (GTO) dalam jumlah memadai</p> <p>c. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum tentang ketertiban terhadap bangunan yang tumbuh di sekitar jalan masuk ke jalan tol dan jalan keluar dari jalan tol</p> <p>d. Koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dalam hal ketertiban lalu lintas</p>	Jalan arteri di sekitar jalan masuk dan jalan keluar dari jalan tol	Tahap operasi selama pengoperasian jalan tol, tengah berlangsung	<p>Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas</p> <p>a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Berkurangnya Waktu Tempuh Perjalanan	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	Waktu tempuh dari Probolinggo ke Banyuwangi atau sebaliknya dari Banyuwangi ke Probolinggo baik melewati jalan tol maupun jalan arteri menjadi lebih pendek	<p>a. Kelancaran dalam transaksi kendaraan yang masuk ke jalan tol dan yang keluar dari jalan tol dengan menerapkan transaksi menggunakan eTol</p> <p>b. Menyediakan Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam jumlah memadai</p> <p>c. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum tentang ketertiban terhadap bangunan yang tumbuh di sekitar jalan masuk ke jalan tol dan jalan keluar dari jalan tol</p> <p>d. Koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dalam hal ketertiban lalu lintas</p>	Gerbang masuk ke jalan tol dan keluar dari jalan tol	Tahap operasi selama pengoperasian jalan tol. tengah berlangsung	<p>dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas</p> <p>a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Peningkatan Perekonomian Wilayah	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	Timbulnya investasi baru terkait dengan mudahnya untuk mengakses lokasi di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	<p>a. Memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya seuas-luasnya di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Pemeliharaan parasarana dan sarana jalan tol agar tetap berfungsi optimal</p>	Wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Tahap operasi selama pengoperasian jalan tol, tengah berlangsung	<p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas</p> <p>a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) & Kontraktor Pelaksanaan selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo
Komponen Kesehatan Masyarakat							
1	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Dampak tidak langsung dari pengoperasian jalan tol	Peningkatan angka kesakitan yang terjadi tetap terkendali sehingga tidak ada keluhan masyarakat	Cukup dengan mengelola dampak primernya yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Jalan tol yang sudah dioperasikan	Selama tahap operasi	<p>a. Instansi Pelaksana kegiatan operasional yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa Kegiatan</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Instansi Penerima laporan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas</p>

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi



3. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

**Tabel 3.1. Matrik Ringkasan RPL
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi**

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Tahap Pra Konstruksi									
Komponen Sosekbud									
1	Timbulnya Spekulan Tanah	Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang jual beli tanah terkait pembangunan jalan tol	Dampak langsung dari pembebasan lahan	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang jual beli tanah terkait pembangunan jalan tol b. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Desa / Kelurahan, yang lahannya terkena pembebasan lahan dalam proyek jalan tol.	Sselama berlangsungnya Tahap Prakonstruksi. Denga frekwensi 3 bulan sekali	Panitia Pengadaan Tanah	Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
2	Berkurangnya Lahan Pertanian	Keberhasilan memberikan lahan pertanian pengganti akibat berubah menjadi jalan tol	Dampak langsung dari pembebasan lahan	a. Wawancara dengan masyarakat yang lahan pertaniannya dibebaskan tentang diperolehnya lahan pertanian baru sebagai pengganti b. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi untuk diketahui sebab-sebab anggota masyarakat tidak	Desa / Kelurahan, yang lahannya terkena pembebasan lahan dalam proyek jalan tol.	Selama berlangsungnya Tahap Prakonstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	Panitia Pengadaan Tanah	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3	Timbulnya Keresahan Masyarakat	a. Ketidakjelasan terhadap besarnya ganti rugi lahan/ bangunan, Belum tercapainya kesepakatan nilai ganti rugi yang akan diterima b.	Dampak langsung dari pembebasan lahan	memperoleh lahan pertanian pengganti. a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang proposi atau jumlah anggota masyarakat yang resah b. Data yang terkumpul dinalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Desa / Kelurahan, yang lahannya terkena pembebasan lahan dalam proyek jalan tol.	Selama berlangsungnya Tahap Prakonstruksi 3 bulan sekali	Panitia Pengadaan Tanah	Kabupaten Banyuwangi Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Kabupaten Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
4	Perubahan Persepsi Masyarakat	Adanya dukungan dari masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan tol	Persepsi positif akibat dari sosialisasi kegiatan Persepsi negatif dampak turunan dari keresahan masyarakat	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang proposi atau jumlah anggota masyarakat yang mempunyai persepsi dan sikap positif atau negatif terhadap pembangunan jalan tol b. Data yang terkumpul dinalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Desa / Kelurahan, yang lahannya terkena pembebasan lahan dalam proyek jalan tol, dan yang dilakukan sosialisasi	Selama berlangsungnya Tahap Prakonstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	Panitia Pengadaan Tanah dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, serta Camat dan Kepala Desa/Lurah yang dilakukan sosialisasi dan terkena pembebasan lahan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Tahap Konstruksi									
Komponen Geofisik Kimia									
1	Penurunan Kualitas Udara	Kandungan Debu, Pb, O ₃ , CO, NO ₂ , SO ₂ tidak melewati	a. Pengoperasian basecamp	a. Sampling kadar debu dengan high volume air sample dan	a. Tapak proyek 8 titik	Selama berlangsungnya tahap konstruksi	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi
1	Penurunan Kualitas Udara (Lanjutan)	ambang batas yg berlaku (PP 41 Thn 1999)	b. Mobilisasi Peralatan Berat c. Pengangkutan Material Konstruksi d. Pembersihan Lahan e. Penggalian dan penimbunan f. Pengerasan badan jalan dan pembangunan jembatan g. Pembangunan jaringan drainase	gas polutan dengan gas sampler & analisis laboratorium b. Hasil analisis Lab dianalisis secara tabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu, PP 41 Thn 1999	b. Permukiman sekitar 8 titik	dengan frekwensi 3 bulan sekali	Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan tidak melewati ambang batas yang berlaku (Kep-48/ MenLH/XI/1996), permukiman – 55 dBA dan areal jalan 70 dBA	a. Pengoperasian basecamp b. Mobilisasi Peralatan Berat c. Pengangkutan Material Konstruksi d. Pembersihan Lahan	a. Pengukuran di lapangan dengan sound level meter b. Hasil pengukuran dianalisis secara tabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu (Kep-48/ MenLH/XI/1996),	a. Tapak proyek 8 titik b. Permukiman sekitar 8 titik	Selama berlangsungnya tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			e. Penggalian dan penimbunan f. Pemasangan badan jalan dan pembangunan jembatan g. Pembangunan jaringan drainase					Kabupaten Banyuwangi,	Kabupaten Banyuwangi
3	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran tidak melewati ambang batas yang berlaku (Kep-49/MenLH/XI/1996),	Dampak langsung dari perkerasan badan jalan dan pembuatan jembatan	a. Pengukuran di lapangan dengan fibrometer b. Wawancara dengan masyarakat sekitar tentang kerusakan bangunan akibat getaran c. Hasil pengukuran dianalisis secara tabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku (Kep-49/MenLH/XI/1996),	a. Tapak proyek 8 titik b. Permukiman sekitar 8 titik	Selama berlangsungnya tahap konstruksi dengan frekwensi setiap saat ketika dilakukan pemasangan tiang pancang	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
4	Perubahan Bentang Alam	Bentuk permukaan lahan yang dilakukan pembangunan jalan tol	Dampak langsung dari pekerjaan penggalian dan penimbunan	a. Pengukuran lapangan dengan teodolit, selanjutnya dipetakan b. Hasil pemetaan dianalisis dengan membuat potongan memanjang dan melintang, dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan hidup awal	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan	Tahap konstruksi selama dilakukan penggalian dan penimbunan dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	Dinas lingkungan hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
5	Gangguan Stabilitas Lereng	a. Kemiringan lereng b. Gejala longsor lereng c. Tingkat pelapukan batuan d. Struktur batuan e. Curah hujan	Dampak langsung dari pekerjaan penggalian dan penimbunan	a. Pengukuran kemiringan dengan klinometer b. Pengamatan visual terhadap gejala longsor, tingkat pelapukan batuan dan struktur batuan c. Hasil pengukuran dan pengamatan dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan	Tahap konstruksi selama dilakukan penggalian dan penimbunan dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
6	Perubahan Pola Aliran Air Hujan	Perubahan pola aliran air hujan yang terjadi dapat terkendali sehingga tidak terjadi banjir dan genangan air di lokasi proyek ataupun areal sekitarnya	Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan	a. Pengukuran luas areal yang tergenang air dengan teodolit b. Pengukuran kedalaman genangan air dengan patok ukur c. Wawancara dengan masyarakat sekitar tentang gangguan akibat timbulnya banjir akibat penggalian dan penimbunan tanah d. Hasil pengukuran dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan serta sekitarnya	Tahap konstruksi selama dilakukan penggalian dan penimbunan dengan frekwensi setiap saat ketika turun hujan lebat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7	Peningkatan Erosi dan Sedimentasi	Erosi dan sedimentasi terkendali	Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan	a. Pengukuran laju erosi dan sedimentasi dengan pemasangan patok ukur b. Pengambilan sampel dan analisis laboratorium sedimen pada sampel yang diambil c. Wawancara dengan masyarakat sekitar tentang gangguan akibat timbulnya erosi dan sedimentasi akibat penggalian dan penimbunan tanah d. Hasil pengukuran dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	a. Areal yang dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan serta sekitarnya b. Badan air sekitar yang mengalami sedimentasi	Tahap konstruksi selama dilakukan penggalian dan penimbunan dengan frekwensi 1 tahun sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanian Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
8	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Parameter BOD, TSS, detergen, minyak dan lemak, koliform tidak melewati ambang batas berlaku (PP 82 Tahun 2003)	a. Dampak langsung dari pengoperasian <i>basecamp</i> b. Dampak langsung dari pembersihan lahan c. Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan d. Dampak langsung dari perkerasan badan jalan dan	a. Sampling dan analisis laboratorium b. Hasil analisis laboratorium dianalisis secara tabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku (PP 82 Thn 2003)	Sungai-sungai besar yang terpotong jalan tol dan sungai terdekat dengan <i>basecamp</i> masing-masing 2 titik, semua berjumlah 20 titik	Selama tahap konstruksi berlangsung dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan sProvinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			pembangunan jembatan e. Dampak langsung dari pembangunan jaringan drainase						
9	Perubahan Sistem Drainase	Sistem drainase tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	Dampak langsung dari pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan	a. Wawancara dengan masyarakat setempat.tentang kelancaran aliran air di jaringan drainase b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum c. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang ketidak lancaran aliran air di jaringan drainase d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Lokasi pembangunan jalan tol yang terdapat jaringan irigasi teknis eksisting	Tahap konstruksi, selama dilakukan pekerjaan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah dengan frekwensi sertiap saat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum robolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
10	Perubahan Pola Aliran Irigasi	Jaringan irigasi eksisting tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	Dampak langsung dari pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan	a. Wawancara dengan masyarakat setempat.tentang berkurangnya fungsi jaringan irigasi eksiting b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas pertanian c. Mengevaluasi aduan masyarakat mengenai berkurangnya fungsi jaringan irigasi eksiting d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi	Lokasi yang terdapat jaringan irigasi teknis eksisting	Tahap konstruksi, selama dilakukan pekerjaan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah dengan frekwensi sertiap saat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal				Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
11	Gangguan Gorong-Gorong Eksisting	Gorong-gorong eksisting tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol Dampak langsung akibat pembangunan jembatan dan block culvert	Dampak langsung dari pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang berkurangnya fungsi gorong-gorong eksisting b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum c. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang berkurangnya fungsi gorong-gorong eksisting d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Lokasi yang terdapat gorong-gorong dan drainase eksisting	Tahap konstruksi, selama dilakukan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah dengan frekwensi sertiap saat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
12	Gangguan Utilitas Eksisting	Jaringan utilitas tidak terkena kegiatan sehingga tetap berfungsi selama dan sesudah pembangunan jalan tol	Dampak langsung dari pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang berkurangnya fungsi utilitas eksisting b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum c. Memanfaatkan data yang ada pada pemilik utilitas d. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang berkurangnya fungsi utilitas e. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Lokasi pembangunan jalan tol yang terdapat jaringan utilitas eksisting	Tahap konstruksi, selama dilakukan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah dengan frekwensi sertiap saat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, serta pemilik Utilitas yaitu PT Perusahaan Listrik negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									Telkom dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN)
Komponen Biologi									
1	Perubahan Populasi Flora Dan Fauna Darat	Jenis dan jumlah vegetasi yang hilang dan yang berhasil ditanam pada sisi kiri kanan jalan	Dampak langsung dari pembersihan lahan serta penghijauan sisi kiri kanan jalan	a. Pengamatan lapangan tentang flora yang hilang dan fauna yang bermigrasi akibat pembersihan lahan b. Pengamatan lapangan tentang flora yang tumbuh subur dan satwa yang hadir akibat penghijauan c. Wawancara dengan masyarakat setempat. keberadaan jenis satwa liar d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Areal yang dilakukan pembersihan lahan	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan dan penghijauan sisi kiri kanan jalan dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
2	Gangguan Kehidupan Biota Perairan	Keaneka ragaman biota perairan (plankton, benthos dan nekton) di badan air tetap terjaga	a. Dampak tidak langsung dari pengoperasian <i>basecamp</i> b. Dampak tidak langsung dari pembersihan lahan c. Dampak tidak langsung dari penggalian dan penimbunan d. Dampak tidak langsung dari	a. Sampling dan analisis laboratorium b. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang keberadaan ikan sungai c. Hasil analisis dan data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya	Sungai-sungai besar yang terpotong jalan tol dan sungai terdekat dengan <i>basecamp</i> masing-masing 2 titik, semua berjumlah 20 titik	Selama tahap konstruksi selama pengoperasian <i>basecamp</i> , pembersihan lahan, penggalian dan penimbunan tanah, perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan serta pembangunan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			perkerasan badan jalan dan pembangunan jembatan e. Dampak tidak langsung dari pembangunan jaringan drainase			jaringandrainseb berlangsung dengan frekwensi 3 bulan sekali		Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
Komponen Sosekbud									
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	a. Tingkat partisipasi angkatan kerja lokal dalam kegiatan proyek. b. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dari upah/pendapatan yang dihasilkan dari keterlibatannya dalam proyek.	Dampak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang jumlah angkatan kerja setempat yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol. b. Memanfaatkan data yang ada di Kantor Desa/Kelurahan tentang jenis opekerjaan yang dilkukan oleh angkatan kerja di wilayahnya c. Memanfaatkan data nyang ada di Bagian Personalia Kontraktor Kontruksi yang ditunjuk tentang jumlah tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja setempat d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Desa / Kelurahan, terdekat atau dilalui oleh jalan tol	Selama tahap konsruksi selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja dan ransmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja dan ransmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									Kabupaten Banyuwangi serta Camat Setempat
2	Peningkatan Peluang Berusaha	Terciptanya peluang usaha dari mitra sub-kontrak dalam kegiatan proyek. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dari pendapatan yang dihasilkan dari proyek.	Dampak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi	a. Wawancara dengan masyarakat tentang anggota masyarakat yang membuka usaha baru terkait dengan pembangunan jalan tol b. Memmanfaatkan dta yang ada di Kantor Desa dan Kelurahan mengenai usaha baru yang dikembangkan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan jalan tol c. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Desa / Kelurahan, terdekat atau dilalui oleh jalan tol	Selama tahap konstruksi selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, serta Camat Setempat
3	Timbulnya Kecemburuan Sosial	Jumlah angkatan kerja setempat yang cemburu dan protes karena tidak dapat memanfaatkan kesempatan kerja	Dampak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang jumlah angkatan kerja setempat yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan kerja namun ingin dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol. b. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi untuk diketahui sebab-sebab terjadinya kecemburuan sosial	Desa / Kelurahan, terdekat atau dilalui oleh jalan tol	Selama tahap konstruksi selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja dan ransmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja dan ransmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									Banyuwangi, serta Camat Setempat
4	Gangguan Kamtibmas	Kondisi kamtibmas tetap terjaga, sehingga tidak terjadi tindak kejahatan seperti pencurian, perkelahian, mabuk mabukan dan sebagainya	Dampak langsung dari pengoprasian basecamp	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang tindak kejahatan yang terjadi b. Memanfaatkan data yang ada di Kepolisian setempat tentang kasus tindak kejahatan c. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Desa/kelurahan tempat dioperasikan basecamp	Tahap konstruksi selama dilakukan pengoperasian basecamp dengan frekwensi setiap saat jika diperlukan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian setempat di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
5	Berubahnya Lahan Pertanian	Lahan pertanian masyarakat berupa sawah dan ladang akan berubah menjadi jalan tol	Pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah	a. Wawancara dengan masyarakat yang lahan pertaniannya berubah menjadi lahan untuk pembangunan jalan tol tentang diperolehnya lahan pertanian baru sebagai pengganti b. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi untuk diketahui sebab-sebab anggota masyarakat tidak memperoleh lahan pertanian pengganti.	Desa / Kelurahan, yang lahannya terkena pembangunan jalan tol	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah dengan frekwensi setiap saat jika diperlukan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
6	Pemisahan Wilayah Permukiman	Jalan atau penghubung antar wilayah permukiman tetap berfungsi	Pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah	a. Wawancara dengan masyarakat tentang fungsi jalan jembatan yang menghubungkan antar wilayah permukiman b. Memanfaatkan data yang ada di aparat pemerintahan	Desa / Kelurahan, yang dilewati pembangunan jalan tol	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				setempat dan kepolisian setempat tentang adanya protes masyarakat terkait dengan terpisahnya wilayah permukiman c. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi untuk diketahui sebab-sebab terjadi pemisahan wilayah permukiman		ntanah dengan frekwensi setiap saat jika diperlukan		Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
7	Terputusnya Hubungan Kekerabatan Masyarakat	Terganggunya mobilitas penduduk dalam bersilahturami dapat teratasi	a. Dampak langsung dari pembersihan lahan b. Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah	a. Wawancara dengan masyarakat tentang terganggunya mobilitas dalam bersilahturami b. Memanfaatkan data yang ada di aparat pemerintahan setempat dan kepolisian setempat tentang adanya protes masyarakat terkait dengan terputusnya hubungan kekerabatan c. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi untuk diketahui sebab-sebab terjadi terputusnya hubungan kekerabatan masyarakat	Desa / Kelurahan, yang lahannya terkena pembangunan jalan tol.	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan ntanah dengan frekwensi setiap saat jika diperlukan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
8	Kerusakan Jalan Eksisting	a. Keluhan dari pemakai jalan umum b. Lokasi, panjang dan lebar jalan yang rusak c. Kerusakan jalan kabupaten dan jalan desa	a. Dampak langsung dari mobilisasi peralatan berat b. Dampak langsung dari pengangkutan matterial konstruksi	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang kerusakan jalan akibat pelanggaran dalam menggunakan jalan kabupaten/jalan desa b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum tentang kerusakan jalan	Jalan kabupaten dan jalan desa apabila digunakan untuk mobilisasi serta pengangkutan material konstruksi	Tahap konstruksi, selama dilakukan mobilisasi peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo,

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		akibat mobilisasi peralatan dan pengangkutan material konstruksi dapat dihindari		c. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang kerusakan jalan akibat pelanggaran menggunakan jalan kabupaten/jalan desa d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal		dengan frekwensi setiap saat jika diperlukan		Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
9	Penurunan Kinerja Jalan Eksisting	a. Tingkat pelayanan jalan dinyatakan dengan derajat kejenuhan (DS) dapat terjaga b. Keluhan dari pemakai jalan umum tidak ada c. Kelancaran lalu lintas di jalan eksisting (kinerja jalan eksisting) tetap terjaga walaupun ada mobilisasi peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi	a. Dampak langsung dari mobilisasi peralatan berat b. Dampak langsung dari pengangkutan material konstruksi	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang terganggunya perjalanan akibat mobilisasi peralatan berat dan material konstruksi b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Perhubungan dan Polantas c. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang terganggunya perjalanan d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Jalan eksisting di sekitar yang persimpangan jalan masuk ke lokasi proyek digunakan untuk mobilisasi serta pengangkutan material konstruksi	Tahap konstruksi, selama dilakukan mobilisasi peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi dengan frekwensi setiap saat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
10	Perubahan Budaya Kearifan Lokal	<p>a. Adanya perubahan kebudayaan kearifan lokal dapat terkendalai walaupun ada pelaksanaan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah</p> <p>b. Tidak ada keluhan dari anggota masyarakat tentang adanya perubahan kearifan lokal yang selama ini dipertahankan masyarakat walaupun ada pelaksanaan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah</p>	<p>a. Dampak langsung dari pembersihan lahan</p> <p>b. Dampak langsung dari penggalian dan penimbunan tanah</p>	<p>a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang adanya perubahan kebudayaan kearifan lokal khususnya dalam melakukan hubungan kekerabatan</p> <p>b. Memanfaatkan data yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>c. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang adanya perubahan kebudayaan kearifan lokal</p> <p>d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal</p>	Desa / Kelurahan, di sekitar lokasi jalan tol	Tahap konstruksi selama dilakukan pembersihan lahan serta penggalian dan penimbunan tanah berlangsung dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas P Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
11	Perubahan Persepsi Masyarakat	Persepsi negatif dapat diatasi sehingga anggota masyarakat sekitar semuanya	Dampak tak langsung dari penerimaan tenaga kerja konstruksi a	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang dukungannya terhadap pembagunan jalan tol	Desa / Kelurahan, yang dilewati pembangunan jalan tol dan wilayah	Tahap konstruksi selama dilakukan mobillisasi tenaga kerja	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		berpersepsi positif atau proyek mendapat dukungan penuh dari masyatrakat		b. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	desa/kelurahan sekitar	konstruksi dengan frekwensi 6 bulan sekali	Pemrakarsa kegiatan	Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
Komponen Kesehatan Masyarakat									
1	Gangguan kesehatan masyarakat	Tidak terjadi peningkatan angka kesakitan karena timbulnya jenis penyakit (ISPA, iritasi mata) terkait dengan pekerjaan konstruksi jalan tol sehingga tidak terjadi keluhan masyarakat	Dampak tak langsung dari : a. Pengoperasian basecamp b. Mobilisasi peralatan berat c. Pengangkutan material konstruksi d. Pekerjaan penggalian dan penimbunan e. Pekerjaan perkerasan badan jalan	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang penyakit yang diderita akibat pembangunan jalan tol b. Memanfaatkan data yang ada di Puskesmas dan Dinas Kesehatan c. Data yang terkumul secara tabulasi	Permukiman penduduk di Desa/kelurahan sekitar lokasi pembangunan jalan tol	Tahap konstruksi selama dilakukan pengoperasian basecamp, mobilisasi peralatan, pengangkutan material, pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan perkerasan badan jalan dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) oq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,serta Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Terkelolanya limbah yang timbul karena penanganan dengan benar Jumlah sampah non B3 dan limbah padat B3 serta timbulnya aduan yang disampaikan masyarakat	Dampak langsung dari pengoperasian <i>basecamp</i>	a. Pengamatan secara visual di lapangan tentang cara mengelola sampah dan limbah B3 yang ditimbulkan b. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang sejauh mana timbulan sampah mengganggu c. Memanfaatkan data yang ada di petugas kebersihan d. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang adanya timbulan sampah e. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi	Lokasi <i>basecamp</i> dan sekitarnya	Tahap konstruksi selama dilakukan pengoperasian <i>basecamp</i> dengan frekwensi 1 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
Tahap Operasi									
Komponen Geofisik Kimia									
1	Penurunan Kualitas Udara.	Kadar Debu, CO, NO ₂ , SO ₂ , Pb dan O ₃ di bawah baku Mutu menurut PP 41 Thn 1999	Dampak langsung dari pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.	a. Sampling kualitas udara ambient untuk debu dengan high volume air sample dan untuk gas polutan gas sampler & analisis laboratorium b. Hasil analisis Lab dianalisis secara tabulasi dan dibandingkan dg baku mutu, PP 41 Thn 1999 c. Jika memungkinkan melakukan uji emisi kendaraan bermotor sebelum masuk Jalan Tol dengan frekwensi 1 tahun skali	Pintu masuk/keluar jalan tol 7 titik dan permukiman terdekat 7 titik	Tahap operasi selama dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi,
2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan Menurut Kep-48/ MenLH/11/1996,	Dampak langsung dari pengoperasian	a. Pengukuran di lapangan dengan sound level meter	Pintu masuk/keluar jalan tol 7 titik dan	Tahap operasi selama dilakukan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Komponen Sosekud									
1	Penurunan Kinerja Jalan Di Sekitar Gerbang Masuk	Kelancaran lalu di persimpangan jalan masuk lintas tetap terjaga	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang adanya antrian panjang di sekitar gerbang masuk jalan tol b. Memantapkan data yang ada di Dinas Perhubungan c. Mengevaluasi aduan masyarakat tentang ketidak lancaran lalu lintas di persimpangan jalan masuk ke gerbang tol d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Jalan arteri Probolinggo-Banyuwangi di sekitar jalan masuk dan jalan keluar dari jalan tol	Tahap operasi selama dilakukan pengoperasian jalan tol dengan frekwensi setiap saat	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta Polisi Lalu Lintas
2	Perubahan penggunaan lahan di sekitar jalan masuk dan keluar gerbang tol	Pertumbuhan bangunan di sekitar jalan masuk ke jalan tol dan jalan keluar dari jalan tol terkendali sehingga tidak menimbulkan	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	a. Pengamatan visual lapangan tentang pertumbuhan bangunan di sekitar jalan masuk dan jalan keluar gerbang tol b. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang adanya pertumbuhan	Areal di sekitar jalan masuk dan jalan keluar dari jalan tol	Tahap operasi selama dilakukan pengoperasian jalan tol dengan frekwensi 6 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup,

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3	Peningkatan Kinerja Jalan Arteri Ekisting	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di sepanjang jalan arteri antara Probolinggo sampai Banyuwangi karena berkurangnya jumlah kendaraan yang lewat hialan arteri	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	a. Survei kendaraan yang lewat untuk dilakukan perhitungan derajat kejenuhan (DS) atau V/C rasio. b. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang hambatan yang terjadi di sepanjang jalan arteri c. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Jalan arteri Probolinggo-Banyuwangi di sekitar jalan masuk dan jalan tol keluar dari jalan tol	Selama tahap operasi berlangsung dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
4	Berkurangnya Waktu Tempuh Perjalanan	Waktu tempuh dari Probolinggo ke Banyuwangi atau sebaliknya dari Banyuwangi ke Probolinggo baik melewati jalan tol maupun jalan arteri	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	a. Wawancara dengan masyarakat pengguna jalan tol tentang berapa lama perjalanan dari Probolinggo ke Banyuwangi atau sebaliknya dari Banyuwangi ke Probolinggo	Di jalan masuk ke jalan tol dan jalan keluar dari jalan tol di sekitar Gerbang Tol Kraksaan dan Geerbang Tol Banyuwangi	Selama tahap operasi berlangsung dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) cq Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5	Peningkatan Perekonomian Wilayah	Timbulnya investasi baru terkait dengan mudahnya untuk mengakses lokasi di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dampak langsung dari pengoperasian jalan tol	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang adanya pertumbuhan usaha baru di wilayahnya b. Memanfaatkan data yang ada di Badan Penanaman Modal c. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal	Di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Selama tahap operasi berlangsung dengan frekwensi 1 tahun sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi
1	Gangguan kesehatan masyarakat	Tidak terjadi peningkatan angka kesakitan karena timbulnya jenis penyakit (SPA, Intasi mata) terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol sehingga tidak	Dampak tak langsung dari pengoperasian jalan tol	a. Wawancara dengan masyarakat setempat tentang jenis penyakit yang diterima terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol b. Memanfaatkan data yang ada di Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat mengenai jenis penyakit yang timbul terkait dengan jalan tol	Pemukiman penduduk di Desa/kelurahan sekitar lokasi jalan tol	Tahap operasi selama dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dengan frekwensi 3 bulan sekali	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kontraktor Pelaksana selaku Pemrakarsa kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi

Komponen Kesehatan Masyarakat

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	Palaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		terjadi keluhan masyarakat		c. Mengevaluasi keluhan masyarakat tentang adanya jenis penyakit yang timbul terkait dengan jalan tol d. Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi dibandingkan dengan rona lingkungan hidup awal				Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi	Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi



4. JUMLAH DAN JENIS PPLH YANG DIBUTUHKAN

BAB IV

JUMLAH DAN JENIS PPLH YANG DIBUTUHKAN

Tidak diperlukan izin PPLH terkait dengan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.



5. PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL

BAB V

PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HERRY TRISAPUTRA ZUNA
Jabatan : Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
Alamat : Gedung Sapta Taruna Lantai II
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110
Jenis Kegiatan : Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah kami buat dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pedoman operasional bagi kami selaku pemrakarsa kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
2. Kami selaku pemrakarsa kegiatan bersedia melaksanakan dan mematuhi semua materi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ini.
3. Apabila ternyata di kemudian hari kami tidak melaksanakan seperti apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ini, maka kami bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta , Oktober 2017

Kepala BPJT,

Herry Trisaputra Zuna
NIP. 19670515 199602 1 001



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., & Munir, R., 1987, Lingkungan – Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Badan Pengatur Jalan Tol, 2006, Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
- Badan Pengatur Jalan Tol, 2006, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
- Badan Pengatur Jalan Tol, 2006, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
- Badan Pengatur Jalan Tol, 2006, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
- Badan Pengatur Jalan Tol, 2016, Review Desain Engineering Detail Rencana Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
- Badan Pengatur Jalan Tol, 2017, Dokumen Rancangan Pengadsn Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kecamatan Maron Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kecamatan Pajarakan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kecamatan Krejengan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kecamatan Kraksaan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kecamatan Paiton Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2017, Kecamatan Kotaanyar Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Banyuglugur Situbondo Dalam Angka Tahun 2017

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Besuki Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Suboh Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Mlandingan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Bungatan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Kendit Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Panarukan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Situbondo Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Panji Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Kapongan Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Arjasa Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Jangkar Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Asembagus Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2017, Kecamatan Banyuputih Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2017, Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2017, Kecamatan Wongsorejo Dalam Angka Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2017, Kecamatan Kalipuro Dalam Angka Tahun 2017
- Bakosurtanal, 1999, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1707-444 Possumur
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-223 Gending
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-223 Gending Lembar 1608-224 Kraksaan

DAFTAR PUSTAKA

- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-242 Jabungsisir
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-331 Paiton
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-332 Besuki
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-341 Mlandingan
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1608-341 Panarukan
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Panarukan (Tahun 2000), Lembar 1708-131 Situbondo (Tahun 2000)
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1708-132 Jangkar
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1708-122 Wongsorejo
- Bakosurtanal, 2000, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1707-422 Gilimanuk
- Bakosurtanal, 2001, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1708-114 Asembagus
- Bakosurtanal, 2001, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1708-123 Curahtemu
- Bakosurtanal, 2001, Peta Rupa Bumi Digital Indonesia berskala 1 : 25.000 Lembar 1708-121 Tangkup
- Canter, L.W., 1977, Environmental Impact Assessment. Mc Graw Hill Book Co, New York.
- Canter, L., W, & Hill, L. G., 1981. Handbook of Variables for Environmental Impact Assessment. Ao Harbqr Scie. Publ. Lnc.
- Chafid Fandeli, 1992. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan. Liberty Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, 1999, Indonesian Highway Capacity Mannual (IHCM), Jakarta.
- Direktorat Sistem Jaringan Prasarana, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, 2003. Pedoman Perencanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Jakarta.
- _____. 2003. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Jakarta.

- _____, 2003. Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Jakarta.
- Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Manajemen Lingkungan, Jakarta.
- Gunarwan Suratmo, 1991, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadi, S.P., 1995, Aspek Sosial Analisis Dampak Lingkungan; Sejarah, Teori dan Metode. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jones, J.R.E., 1964. Fish and River Pollution. Butter Worths, London.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Memprakirakan Dampak Lingkungan Kualitas Udara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, 2016, Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Revisi XI) Lembar 1608 Probolinggo
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, 2016, Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Revisi XI) Lembar 1708 Situbondo
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, 2016, Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Revisi XI) Lembar 1707 Denpasar dan Jawa Timur
- Kovacs, M., 1992. Biological Indicators in Environmental Protection. Ellis Horwood, London.
- Lee, C.D., 1978, Benthos Macroinvertebrate and Fish as Biological Indicators of Water Quality with Reference to Community Diversity Index. International Conference on Water Pollution Control, Bangkok.
- Lee, J., 1985, The Environment, Public Health and and Human Ecology Consideration for Ecoomic Development World Bank Publication. John Hopkins University Press. Baltimore, Maryland.
- Mori, K., 1993, Manual on Hydrology – Hidrologi untuk Pengairan. PT Pradnya Paramitha, Jakarta.

- Nastiti, K., 1999, Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting Komponen Biologi Terrestrial. Diktat Kursus AMDAL B, PPSML Universitas Indonesia, Jakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Neely, M.C., Neimanis, R.N. & Dwyer, L., 1979, Water Quality Source Book. A Guide to Water Quality Parameters. Inland Waters Directorate, Ottawa-Canada.
- Poespowardojo, R.S., 1981. Peta Hidrogeologi Lembar Jember Jawa. Skala 1 : 250.000. Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Bandung
- Rau, J.G & Wooten, D.C., 1980, Environmental Impact Hand Book, McGraw-Hill Book Company, Toronto, Canada.
- Santosa, S & Suwari, T., 1992. Peta Geologi Lembar Banyuwangi Jawa. Skala 1 : 100.000. Puslitbang Geologi. Bandung.
- Santosa, S & Suwari, T., 1992. Peta Geologi Lembar Situbondo Jawa. Skala 1 : 100.000. Puslitbang Geologi. Bandung.
- Santosa, S & Suwari, T., 1992. Peta Geologi Lembar Besuki Jawa. Skala 1 : 100.000. Puslitbang Geologi. Bandung.
- Suharsono & Suwari, T., 1992. Peta Geologi Lembar Besuki Jawa. Skala 1 : 100.000. Puslitbang Geologi. Bandung.
- Seyhan, E., 1990, Dasar-dasar Hidrologi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soemarto, 1987, Hidrologi Teknik. Usaha Nasional, Surabaya.
- Soemarwoto, O, 1992, Analisis Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiharto, 1987, Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah. Penerbit UI Press. Cetakan Pertama, Jakarta.
- Suripin, 2003. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Wardoyo, S.T.H., 1994, Manajemen Kualitas Air. Fakultas Perikanan IPB, Bogor.
- Wirosuhardjo, K., 1989. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. UI Press, Jakarta.
- Wisnu Arya Wardhana, 1995, Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit Andi Offset, Jakarta.